KATA PENGANTAR

Puji syukur tidak lupa kami sanjungkan kehadirat Allah S.W.T yang sampai saat ini masih memberikan kesehatan dan kesempatan waktu kepada kami, sehingga dengan Rahmat-Nya jualah Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Kaum tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai rencana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan Tahunan yang akan melihat sejauh mana Kinerja Organisasi memberikan manfaat atas pekerjaan yang dilaksanakan pada Instansi Kecamatan Lima Kaum selama Tahun 2018 serta menyajikan data konstruksi keberhasilan Organisasi Kecamatan Lima Kaum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lima Kaum tahun 2018 merupakan suatu Dokumen yang diformalkan dalam komponen dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari perencanaan stratejik, penyusunan rencana kinerja Tahun 2018 dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mampu mengidentifikasi dan menyajikan Alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja dimasa mendatang dan juga menyajikan perubahan kebijakan untuk perbaikan ditahun yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini jauh dari standar ideal sebagaimana yang digariskan, karena itu perlu kiranya masukan berupa kritik dan saran yang konstrruktif dan Objektif dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini ditahun-tahun berikutnya.

Lima Kaum, Januari 2019

CAMAT LIMA KAUM

AFRIZAL, SE NIP. 19670330 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	i
RINGK	ASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTA	AR ISI	iv
DAFTA	AR TABEL	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	LATAR BELAKANG	1
В.	KEWENANGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	2
C.	LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH	22
D.	SISTEMATIKA PENULISAN	23
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	27
A.	VISI DAN MISI	27
В.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	28
C.	SASARAN DAN PROGRAM	30
D.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	33
E.	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2017	36
F.	PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2017	42
BAB II	I AKUNTABILITAS KINERJA	45
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	46
В.	REALISASI ANGGARAN	57
BAB I\	/ PENUTUP	62
A.	KESIMPULAN	65
В.	SARAN	66

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 PER TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tujuan dan Sasaran Strategis	. 29
Tabel 2	: Sasaran Strategis dan Program	32
Tabel 3	: Indikator Kinerja Utama (IKU)	34
Tabel 4	: Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2014	41
Tabel 5	: Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014	43
Tabel 6	: Analisis Capaian Kinerja – Sasaran (1)	46
Tabel 7	: Analisis Capaian Kinerja – Sasaran (2)	53
Tabel 8	: Analisis Capaian Kinerja – Sasaran (3)	54
Tabel 9	: Analisis Capaian Kinerja – Sasaran (4)	54
Tabel 10	: Analisis Capaian Kinerja – Sasaran (5)	55
Tabel 11	: Analisis Capaian Kinerja – Sasaran (6)	55
Tabel 12	: Akuntabilitas Keuangan	58
Tabel 13	: Pengukuran Kinerja	а

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran	Persentase Masjid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan Keagamaan	45 Masjid/Mushalla	46 Masjid/Mu shalla	102
	Agama	Persentase /Jumlah Cabang Lomba MTQ Tk. Kabupaten yang diikuti	10 Cabang	10 Cabang	100
2.	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Budaya	Persentase/Jumlah Cabang Lomba yang diikuti Kecamatan dalam Festival Seni dan Budaya	10 Cabang	2 Cabang	20
3.	Berkurangnya Kenakalan Remaja dan Perbuatan	 Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan 	5 Nagari/ 24 Kali	5 Nagari/ 24 kali	100
	Maksiat	Jumlah Pembinaan Keamanan yang di laku kan di Masyarakat	5 Nagari/ 48 kali	5 Nagari/48 kali	100
		3 Jumlah Sekolah SLTP dan. SLTA yang dibina	17 Sklh	17 Sklh	100
4.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Pemuda Yang dibina	8 Kelompok	8 Kelompok	100
5.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Norma-norma dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jumlah Nagari Binaan. Sadar Hukum	1.Nagari Limo Kaum 2.Nagari Parambahan 3.Nagari Labuh 4.Nagari Baringin 5.Nagari Cubadak	5 Nagari	100
		Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina	20 Kelompok / 5 Nagari	20 klp / 5 Nagari	100
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang telah merekam Data E-KTP	450 orang	321 orang	71,3
		Jumlah Nagari yang melaksanakan bulan bhakti goro,DAUN,DAKN dan Bulan Bakti Goro serta lomba nagari	5 Nagari	5 Nagari	100
		Jumlah Musrenbang Desa/Nagari yang dilaksanakan	5 Nagari	5 Nagari	100
		4 Jumlah Buku Kecamatan . Dalam Angka	1 Buku	Buku	100

5 Jumlah Dokumen . Keuangan (LAKIP, RENJA, RENSTRA,RKA/DPA)	20 Buku / 5 Dokumen	20 Buku / 5 Dokumen	100
6 Persentase . pendistribusian Raskin	12 Bulan	12 Bulan	100
7 Jumlah PNS yang. mengikuti Pendidikan	10 Orang	10 Orang	100

Tabel 13 : Pengukuran Kinerja

Lima Kaum, Januari 2019

CAMAT LIMA KAUM

AFRIZAL, SENIP. 19670330 198903 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 Kecamatan Lima Kaum melaporkan capaian kinerja selama tahun 2018 dibanding dengan Rencana Kerja tahun 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setelah selesai melaksanakan APBD dalam satu tahun Anggaran merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2018 Kecamatan Lima Kaum telah menganggarkan Belanja sebesar Rp. 2.116.173.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.005.167.586 atau 94,75 % dan rincian sebagai berikut:

JENIS BELANJA	ANGGARAN 2017	REALISASI	%
Belanja Tidak Langsung	1.130.228.000,00	1.078.388.429,00	94,75
Belanja Pegawai	1.130.228.000,00	1.078.388.429,00	94,75
Belanja Langsung	985.945.000,00	926.779.157,00	89,03
Belanja Pegawai	50.325.000,00	49.745.000,00	99,96
Belanja Barang & Jasa	690.542.000,00	637.756.157	87,85
Belanja Modal	245.078.000,00	239.227.000,00	96,29
Jumlah	2.116.173.000,00	2.005.167.586,00	94,75

Laporan Kinerja/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan LimaKaum ini menginformasikan program dan kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Jika dilihat dari persentase capaian kinerja pada tahun 2018 hasil yang didapat cukup baik, kunci utama yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran program ini adalah adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kecamatan dan seluruh aparat Pemerintah serta dukungan dari masyarakat untuk memfokuskan pemanfaatan sumber daya dan dana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja tahun 2017 Kecamatan Lima Kaum merumuskan Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut:

- Percepatan pelaksanaan program-program berikut kegiatan setiap tahunnya.
- 2. Tetap konsisten untuk melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan.
- 3. Mengoptimalkan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisien dan efektifitas.
- 4. Secara khusus masih perlu dilakukan penelitian atas kwalitas indikator kinerja berikut target kinerjanya dari setiap sasaran strategis yang ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menindak lanjuti amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018, membuat Perjanjian Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2000 tentang cara pertanggungjawaban kepala Daerah, Bupati diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban secara horizontal kepada DPRD setiap akhir tahun yang biasanya disebut pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pada dasarnya Pertanggung Jawaban Bupati kepada DPRD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjelaskan kinerja penyelengaraan pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk Akuntabilitas Penyelengaraan Pemerintah Daerah, sejalan dengan itu melalui instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 telah dikembangkan suatu modul pertanggung jawaban yang sistimatis, logis, dan terukur yang dikenal dengan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Selain itu Pelaporan AKIP juga untuk mendorong terciptanya efisiensi, efektifitas serta produktifitas penyelengaraan pemerintah daerah, dengan demikian seyogyanya pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD bukan semata-mata di pandang sebagai upaya untuk menentukan kelemahan pelaksanaan Pemerintah Daerah, apalagi dipergunakan untuk menjatuhkan Bupati, melainkan lebih bersifat sebagai laporan pelaksanaan tugas selama 1 tahun anggaran (Progres report).

Laporan Pertanggung Jawaban yang dikemas dalam sistem AKIP ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi DPRD dan umpan balik bagi Bupati, secara bersama-sama menyepakati dan menetapkan kebijaksanaan umum pemerintah daerah, sehingga pada gilirannya akan mendorong peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun berikutnya.

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah harus dapat menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta lebih untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran, tujuan dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam pencanangan stratejik Kecamatan Lima Kaum guna mewujudkan good governance maka perlu dikembangkan suatu media pertanggung jawaban yang sistimatis, logis dan terukur yang dikenal sebagai Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. KEWENANGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. Kewenangan

Kewenangan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan laporan tahunan secara horizontal kepada DPRD mengenai pelaksanaan APBD tahun 2018 dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian Kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kepala Daerah disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 3) Undang-undang nomor 4 tahun 1999, tentang peran dan fungsi DPR dan DPRD;
- 4) Undang-undang Nomor 105 tahun 2000, tentang pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 108 tahun 2000 tentang cara pertanggungjawaban kepala Daerah;
- 6) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 4 tahun
 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 (APBD) Kabupaten Tanah Datar;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 15 tahun
 2003 tentang perubahan APBD;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 126 ayat (3), selain menjalankan tugas dimaksud diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah nagari.

Selanjutnya penjabaran tentang tugas umum camat tersebut terdapat dalam PP no 19 Tahun 2008 tentang kecamatan meliputi :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan

- pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengkoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa / nagari yaitu :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Nagari/desa dan/atau kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari/desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap WaliNagari dan kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari/desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
 Nagari/desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
 dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari/desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

2. Struktur Organisasi

Selain tugas tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor: 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan sebagai berikut :

- A. Camat
- B. Sekretaris Kecamatan
- C. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- D. Seksi Tata Pemerintahan
- E. Seksi Pelayanan Umum
- F. Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- G. Seksi Kesejahteraan Sosial
- H. Jabatan Fungsional Tertentu

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Uraian tugas Camat adalah:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- Merumuskan norma, standar dan prosedur dan kriteria tugas dan fungsi Kecamatan;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- h. Membina dan mengawas penyelengaraan kegiatanDesa/Nagari;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- j. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang urusan tugasnya;

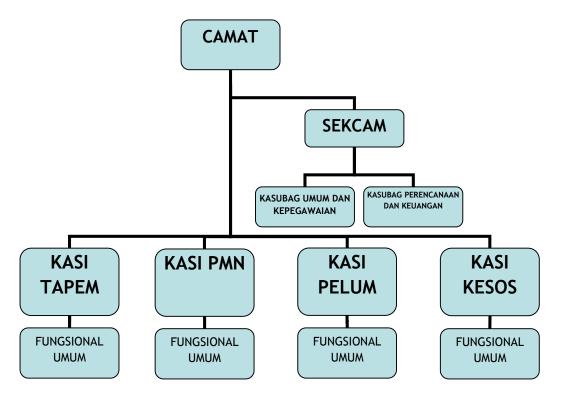
Camat mempunyai fungsi sebagi berikut:

- Pengorganisasian penyelengaraan pemerintah di wilayah kerjanya
- Penyelengaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
- 3) Penyelengaraan pelayanan masyarakat
- 4) Pelaksana pemberdayaan masyarakat
- 5) Penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan
- 6) Penyelengaraan kegiatan pembinaan nagari
- 7) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

Struktur Organisasi Kantor Camat Lima Kaum yang terdiri dari:

- 1) Pejabat eselon III.a adalah Camat
- 2) Pejabat eselon III.b adalah Sekretaris Kecamatan
- 3) Pejabat eselon IV.a adalah:
 - a. Kasi Tata Pemerintahan (TAPEM)
 - b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
 - c. Kasi Pelayanan Umum (PELUM)
 - d. Kasi Kesejahteraan Sosial (KESOS)
- 4) Pejabat eselon IV.b adalah:
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Adapun Struktur Organisasi Kantor Camat Lima Kaum adalah:



Dari Gambar di atas dapat dilihat perangkat kecamatan yang terdiri dari :

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretariat yang dipimpin Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum, Penyusunan Perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, monitoring dan evaluasi serta laporan pertanggung jawaban. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelengarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran,
 administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,
 keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- e. Pelaksanaan tugas laiin yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan asset, humas dan protokoler, bahan penyusunan kebutuhan kepegawaian, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan sesuai dengan perundang-undangan.

Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengendalikan surat masuk, keluar dan kearsipan.
- b. Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan.
- Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan,
 penyaluran, penggunaan dan penghapusan barang
 perlengkapan

- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas, dana rumah dinas serta penggunaan gedung dan kantor.
- e. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah dinas.
- f. Melaksanakan tugas keprotokolan.
- g. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan umum dan kepegawaian.
- i. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- k. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan.
- Menyusun rencana kepegawaian dengan berpedoman kepada program kerja kegiatan terdahulu agar pelaksanaan tugas mencapai hasil yang maksimal.
- m. Membagi tugas kepada staf pelaksana/jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan lancer.
- n. Menyiapkan bahan pembuatan SKP setiap pegawai.
- o. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian kantor.
- p. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai.

- q. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai serta membuat laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan bezeting pegawai.
- Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pension dan surat cuti pegawai.
- s. Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai.
- t. Mengkoordinir kehadiran pegawai dan melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai.
- u. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- v. Mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan.

- c. Menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung.
- d. Memperoses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan.
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- g. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan penata usahaan keuangan.
- Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Seksi tata Pemerintahan

Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

Uraian tugas kepala seksi Tata Pemerintahan adalah :

 Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan
 Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
 Umum.
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
- d. Melakukan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelengaraan kegiatan pemerintahan.
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah propinsi dan Daerah Kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- f. Melakukan pembinaan wawsan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapakan pengamalan pancasila Tahun 1945, pelestrian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- h. Melakukan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan Nasional.
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.

- k. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- m. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan.
- Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran Polsek dan Koramil.
- p. Membuat laporan kejadian yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban.
- q. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan nagari..
- r. Melakukan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- s. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- t. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari/Desa.
- u. Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- v. Melakukan inventarisasi partai-partai politik di kecamatan dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya..

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari di amanahkan dengan tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari di tingkat kecamatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa/ Nagari.
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa/Nagari.
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan.

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan Nagari.
- f. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- g. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Nagari, dilakukan melalui :
 - 1) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa.
 - 2) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan.
 - 3) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
 - 5) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 6) Koordinasi pendampingan Desa diwilayahnya.
 - 7) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
 - 8) Fasilitasi pendayagunaan aset Desa.
- Melakukan evaluasi terhadap Peraturan nagari tentang
 APB Desa/ Nagari.
- Memfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang Kecamatan.
- Melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan.
- k. Melakukan pemberdayaan organisasi perempuan.

- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Pelayanan Umum

Kepala seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan berdasarkan pelimpahan kewenangan bupati . Uraian tugasnya adalah:serta mengjoordinasukan pemeliharaan sarana dan prasarana/ fasilitasi pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan umum.
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pelayanan umum.
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
- d. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan /atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilita pelayanan umum.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- g. Melakukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.

- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- j. Menyiapkan data kependudukan tingkat kecamatan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas seksi kesejahteraan sosial yaitu menyelenggarakan, kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan. Uraian tugasnya adalah:

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial.
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi kesejahteraan sosial.
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
- d. Melakukan monitoring program bantuan sosial.
- e. Melakukan pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olah raga, pembinaan sector pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya.
- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca konflik sosial dan bencana alam.
- g. Melakukan pembinaan kepada lembaga/organisasi keagamaan dan sosial budaya.

3. Tata Kerja

Tata kerja pemerintahan kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, tentang atau dengan sebutan lain Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Fungsi Kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah, tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat eselon III dan IV dan secara umum tupoksi kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Sebagai pembina administrasi umum dan pemerintahan;
- 2) Memberikan rekomendasi perizinan;
- 3) Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan;
- 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 5) Memberikan pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan SDM Dan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- Dalam melaksanakan tugas Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Kecamatan Lima Kaum merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 5 Nagari dengan luas ± 5.000 Ha dan dihuni oleh 38.328 jiwa (10.678 KK). Secara geografis Kecamatan Lima Kaum berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Sungai Tarab Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Rambatan Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Pariangan Sebelah Timur berbatasan dengan: Kecamatan Tanjung Emas sebahagian besar penduduknya (\pm 70%) hidup pada sektor Pertanian, secara Inplisit sektor Pertanian merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan komoditi agro.

Kondisi fisik wilayah pada umunya adalah dataran tinggi dengan curah hujan yang merata, hal ini menyebabkan kehidupan di sektor Pertanian lebih cenderung memanfaatkan pengairan tadah hujan.

Disamping itu Kecamatan Lima Kaum sebagai sentral of Distric, dimana kota Batusangkar sebagai ibu Kota Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terletak di Kecamatan Lima Kaum menyebabkan konsekuensi logis penduduk terdiri dari berbagai jenis dan latar belakang. Khusus di Nagari Baringin dan Lima Kaum penduduknya sangat heterogen karena kedua Nagari tersebut telah berkembang dan lebih maju dari Nagari lain.

Nagari Baringin memiliki Aset Pasar Batusangkar dan berbagai sarana pendidikan dan pemerintah, karena itu secara tidak langsung pertumbuhan dari berbagai sektor menjadi lebih cepat disamping itu secara tidak langsung pertumbuhan dari berbagai sektor menjadi lebih cepat. Disamping itu beberapa komplek pemukiman juga mulai berkembang, sehingga arus pertumbuhan penduduk semakin meningkat...

Demikian juga halnya dengan Nagari Lima Kaum yang merupakan Nagari dengan wilayah paling luas dan memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya budaya. Di Nagari Limo Kaum juga sudah berkembang komplek pemukiman masyarakat dan komplek Perguruan Tinggi Negeri (IAIN) serta Perguruan Tinggi Swasta (AKPER dan AKBID).

Nagari Cubadak juga akan semakin terbuka dengan dipindahkannya Pasar Ternak Batusangkar ke nagari ini dan juga ada pemukiman penduduk, namun Nagari Cubadak masih di latar belakangi penduduk lebih homogen dengan sistim kekerabatan yang masih kental

Hal ini tidak jauh berbeda ditemukan di Nagari Parambahan dan Labuh, dikedua Nagari ini penduduknya lebih homogen, juga mata pencaharian penduduk relatif masih dibidang pertanian.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah selama tahun 2018, capaian kinerja (pedoman result) 2018 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (Performance plan) 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi, analisis atas kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diindentifikasikannya sejauhmana celah kinerja (Performance Gap) bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistimatika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Kaum tahun 2018 secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan, Menyajikan penjelasan umum Organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi dan menjelaskan secara ringkas dari latar belakang, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Lima Kaum, Lingkungan Strategis yang berpengaruh, serta Sitematika Penulisan Laporan Kinerja tahun 2018

BAB II

Perencanaan menjelaskan dan menguraikan ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018, substansi dari Renstra yang telah ditetapkan Bab ini berisi uraian tentang pernyataan Visi dan Misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran

Strategis), yang terdapat dalam RPJMD/Renstra, Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018, Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2018.

BAB III

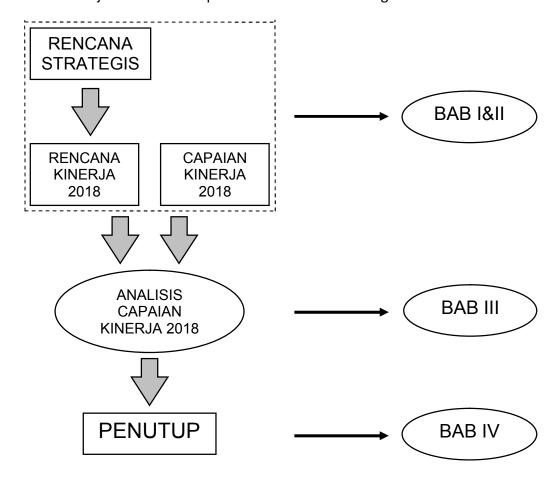
Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018, dan Realisasi Anggaran yang terkait dengan pertanggungjawaban terhadap tahun pencapaian sasaran strategis 2018, membandingkan antara target dan realisasi dan % capaian tahun 2018, dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, antara realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi, **Analisis** penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV

Penutup memuat kesimpulam menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 dan Saran menguraikan beberapa rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan dan langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan Kinerja.

Dengan demikian sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Lima Kaum, perencanaan Stratejis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Kecamatan Lima Kaum agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejis lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendakatan perencanaan stratejis yang jelas dan sinergis, Kantor Camat Lima Kaum lebih dapat menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

A. VISI DAN MISI

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana Kecamatan Lima Kaum harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Kecamatan Lima Kaum.

Mengacu pada konsepsi Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maka Kecamatan Lima Kaum mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dengan visi :

"MEWUJUDKAN APARATUR KECAMATAN YANG PROPESIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK MENUJU MASYARAKAT YANG MADANI BERBUDAYA DAN SEJAHTERA, DILANDASI ADAT DAN AGAMA"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Kecamatan Lima Kaum sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Kecamatan Lima Kaum dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan spesipik yang harus dilaksanakan, apabila Visi dipandang sebagai pemberi Inspirasi sekaligus motivasi, maka Misi dipandang sebagai acuan dalam pengambilan keputusan-keputusan manajemen.

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Lima Kaum menetapkan Misi sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya.
- 2. Meningkatkan SDM. Aparatur Kecamatan yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter sejahtera berdasarkan ABS-SBK.
- 3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal yang baik, bersih dan professional.
- Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui koordinasi dengan penegak hukum, Forkopinca, dan Wali Nagari.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejis, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

Penetapan tujuan stratejis berdasarkan visi dan misi serta kebijakan strategis pembangunan, sasaran strategi Kecamatan Lima Kaum yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Lima Kaum dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula Indikator sasaran, Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing, sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Stratejis tahun 2016-2021.

Untuk mencapai misi Kecamatan Lima Kaum, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode 2016-2021 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	 Terlaksananya Safari Ramadhan, Terlaksananya BKMT, Yasinan, Pondok Al-Qur'an, Didikan Subuh, FASI, Remaja Masjid, dan pemb. Keagamaan lainnya Terlaksananya MTQ. Tk. Kabupaten dan Tk. Kecamatan
2	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Budaya	Meningkatkan Pendidikan, Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai adat dan Budaya Meningkatkan pemahaman terhadap Kelembagaan Sosial Budaya
3	Berkurangnya Kenakalan Remaja dan Perbuatan Maksiat	Terlaksananya pembinaan keamanan Termonitornya keamanan terhadap masyarakat dan para Generasi Muda serta pelajar Meningkatkan Tatanan Kehidupan masyarakat yang aman, damai dan Tentram

4	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Terlaksananya pembangunan yang berkualitas disegala bidang Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat dan Pemuda melalui partisipasi Pemuda dan Masyarakat dalam Pembangunan
5	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Norma-norma dan Peraturan dan Perundang- undangan	Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat Terwujudnya Masyarakat Sadar Hukum dan Berkeadilan
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dengan standar operasional pelayanan Meningkatkan Penyeleng -garaan Pemerintahan yang baik dan bersih Terlaksananya pelayanan prima

Tabel 1 : Tujuan dan Sasaran Strategis

C. SASARAN DAN PROGRAM

Fokus utama dalam menentukan sasaran dari sebuah tujuan adalah tindakan yang akan dilakukan, berikut sasaran dari tujuan Kantor Camat Lima Kaum adalah:

- Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dengan melakukan kunjungan ke Masjid dan Mushalla, Safari Ramadhan, Yasinan, BKMT, Pondok Alqur'an, Didikan Subuh, FASI, Remaja Masjid dan kegiatan keagamaan lainnya
- Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Nilai-nilai Adat dan Budaya dengan meningkatkan pemerataan mutu pendidikan baik formal maupun informal, mengikuti kegiatan festival seni dan budaya yang bersandikan sarak, sarak basandi kitabbullah.
- Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat dengan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tindak kriminal serta melakukan pembinaan keamanan di masyarakat.

- 4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dengan melakukan pembinan Organisasi kepemudaan.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pembinaan sadar hukum dan pembinaan kelompok masyarakat.
- 6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan melakukan pendataan kependudukan, musrenbang, lomba nagari, pendistribusian Raskin dan lain sebagainya.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang diciptakan untuk mewujudkan pola pembangunan yang terintegrasi di Kecamatan Lima Kaum, perlu disusun rencana program dan kegiatan dengan mempedomani arah kebijakan Kabupaten Tanah Datar dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang terpola dan terukur, dengan program sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- 6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- 7. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- 8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- 9. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan.
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari.
- 12. Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari.
- 13. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
- 14. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
- 15. Program pendidikan politik masyarakat.
- 16. Program pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah.
- 17. Program pengelolaan keragaman budaya.
- 18. Program penanggulangan kemiskinan.
- 19. Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan program untuk menggambarkan target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	- Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2	Meningkatnya Pemahaman dan Nilai-nilai Adat dan Budaya	- Pengelolaan Keragaman Budaya
3	Berkurangnya Kenakalan Remaja dan Perbuatan Maksiat	- Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Peningkatan Peran SertaKepemudaanPembinaan dan PemasyarakatanOlah Raga
5	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Norma-norma dan Peraturan Perundang-undangan	 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Partisipasi
 Masyarakat Dalam Pembangunan
 Desa
 Peningkatan Pengembangan
 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
 Dan Keuangan
 Peningkatan Kapasitas Sumber
 Daya Aparatur
 Pelayanan Administrasi
 Perkantoran
 Peningkatan Sarana dan Prasarana
 Aparatur

Tabel 2 : Sasaran Strategis dan Program

Pada tahun 2018 program yang tidak sempurna pelaksanaannya adalah program keragaman budaya dikarenakan pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak mengadakan lomba pada kegiatan festival budaya daerah sehingga tidak ada satupun cabang lomba yang diikuti oleh Kecamatan Lima Kaum dari target cabang lomba yang telah direncanakan. Dan ada juga program yang tidak terlaksana adalah program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan pelaksanaan Visi dan Misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah dengan menentukan Indikator Kinerja Utama.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Datar ditetapkan sejalan dengan tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya

- 3. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
- 4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembanguanan
- 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Norma-norma dan peraturan perundang-undangan
- 6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Utama berikut sumber yang digunakan tergambar dalam tabel dibawah ini :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	1.Jumlah Masjid dan Mushalla yang dikunjungi dalam rangka Pembinaan Keagamaan 2.Jumlah Cbg. Lomba MTQ. Tk. Kab. yg diikuti 3.Jumlah Pengunjung	Formulasi : Jml. Masjid yg dikunjungi dibagi Target pembinaaan X 100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasi Kesos Formulasi : Jml. Cbg. Lomba yg dilaksanakan dibagai target cbg lomba X 100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasi Kesos
		Masjid/Mush. setiap hari 4.Jumlah Klp. Yasinan, BKMT, TPA / TPSA. Yang dikunhjungi	Formulasi ; Jml. Pengunjung dibagi target pengnjung X 100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasi Kesos Formulasi : Jml. Kunjungan dibagi target kunjungan X 100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasi Kesos

2.	Meningkatnya Pemahaman nilai- nilai adat dan	Jumlah cabang lomba yang diikuti	Formulasi : Jml. Cbg. lomba yg diikuti dibagi target cbg lomba X 100 %
	Budaya		Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasi Kesos

3.	Berkurang nya kenakalan Remaja dan Perbuatan Maksiat	1.Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.Jumlah Pembinaan Kea manan yang dilakukan di Masyarakat3.Jumlah Sekolah SLTP, SLTA yang dibina	Formulasi : Jml. Nagari yg dimonitor dibagi target monef X 100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasi PMN Formulasi : Jml. Nagari yg diberikan pembinaan dibagi target pembinaan X 100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasi PMN Formulasi : Jml. Sekolah yg di berikan pembinaan dibagi target pembinaan X 100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasi Kesos
4.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	1.Jumlah kelompok yg dibina	Formulasi : Jml klp yg dibina dibagi target pembinaan X 100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasi Kesos
5.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Norma- norma dan Peraturan Perundang- undangan	1.Jumlah Nagari binaan sadar hukum 2.Jumlah klp. Atau Organisasi Masy. Yang dibina	Formulasi : Jml Nagari yang dibina dibagi target pembinaan X 100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data :
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.Persentase masyarakat yang telah merekam Data E-KTP	Formulasi : Jml Masy. Yg sdh merekam e-KTP dibagi target perekaman X 100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasi Pel. Umum
		2.Jumlah Nagari yang melaksanakan DAUN, DAKN dan Bulan Bakti Goro 3.Jumlah Nagari yang	Formulasi : Jml Nagari yg melaksanakan dibagi target pelaksanaan X 100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasi PMN
		melaksanakan Musrenbang	Formulasi : Jml. Nagari yang melaksanakan Musrenbang dibagi target pelaksanaan Musrenbang X

4.Jumlah buku Kecamatan Dalam Angka	100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasi PMN Formulasi : jml. Monef yg dilakukan dibagi target X 100 % Tipe : Non Komulatif
5.Jumlah Dokumen Keuangan Renstra, Renja,	Sumber data : Kasi PMN Formulasi : Jml dokumen yang dibuat diabagi target pembuatan dokumen
RKA, DPA/DPPA dan LAKIP	X 100 % Tipe : Non Komulatif Sumber data : Kasubag Perencanaan dan keuangan
6.Jumlah pendistri busian Raskin	Formulasi : Jml pendistribu sian Raskin dibagi target X 100 % Tipe ; Non Komulatif Sumber data : Kasi Kesos
7. Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan	Formulasi: Jml. PNS. Yg mengikuti Pddk dibagi target X 100 % Tipe: Non Komulatif Sumber data: Kasubag. Umum dan kepegawaian

Tabel 3 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018 KANTOR CAMAT LIMA KAUM

Kecamatan Lima Kaum sebagai bagian integral dari Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar berkewajiban menyukseskan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Lima Kaum sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar juga menyusun suatu perencanaan stratejik 2016-2021 sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Daerah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lima Kaum pada hakekatnya bertujuan untuk:

- Menciptakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terciptanya akuntabilitas pemerintah di Kecamatan Lima Kaum dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 2. Merencanakan secara sistematis setiap sasaran, program dan kegiatan yang berkesinambungan
- Sebagai penuntun untuk mencapai tujuan organisasi agar dapat berjalan efektif dan akuntabel
- 4. Memberikan pelayanan yang mudah, transparan dan akuntabel (Pelayanan Prima)

E.RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

Dalam penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 Kantor Camat Lima Kaum yang bertujuan untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kecamatan Lima Kaum mengacu kepada sasaran strategis RPJM dan RPJMD Renstra serta Renja Kantor Camat Lima Kaum agar tetap konsiten, eksis, antisifatif dan produktif, suatu gambaran yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus memenuhi tuntutan reformasi, perlu dilaksanakan dengan ketulusan sikap dan tindakan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memuat prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembengunan daerah.

Kedua Undang-Undang tersebut merupakan penjabaran TAP MPR No.XV/MPR/1998 yang menggariskan perlunya penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan yang seluas-luasnya kepada

daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan daerah dalam mengembangkan potensinya sekaligus dapat mengurus sendiri rumah tangganya yang bertujuan untuk menjawab perkembangan keadaan yang terjadi, baik didalam maupun diluar negeri serta tantangan persaingan globalisasi.

Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan perwujudan kapasitas pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah. Untuk itu perlu dilakukan berbagai perubahan karena diyakini pemerintahan terdahulu yang bersifat sentralistik, telah menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat sehingga melemahkan inisiatif daerah dalam menggali potensi dan sumber daya yang ada di daerah. Hal ini jelas sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.

Pergeseran pola dan strategi pembangunan daerah kepada pemberdayaan daerah diharapkan dapat menciptakan keadaan yang kondusif serta pertumbuhan masyarakat yang mampu membangun dirinya sendiri, kompetitif dalam memenuhi minat, kebutuhan dan kepentingan bersama.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan tutuntan arus reformasi, maka terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaran pemerintahan. Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai perwujudan cita-cita Bangsa dan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* antara lain:

 Partisipasi, yaitu memberdayakan setiap warga untuk mempergunakan hak dan menyampaikan pendapat dalam

- proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Penegak Hukum, yaitu menegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang luhur dalam masyarakat.
- Transparasi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyedian informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- 4. Kesetaraan, yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- Daya Tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan, kepedulian para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- 6. Wawasan Kedepan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang telah ditetapkan dan mengikutsertakan dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- Pengawasan, yaitu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik dengan mengusahakan mengikuti visi dan misi yang telah ditetapkan.
- Efisien dan Efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal, cepat, tepat dan bertanggungjawab.
- Profesionalisme, yaitu kemampuan dalam melaksanakan/ melakukan penyelenggaraan pemerintahan agar mampu

memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat, efektif dan efesien dengan biaya terjangkau.

Sebagai tindak lanjut TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan No. 28 tahun 1999 tersebut, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencakup siklus yang terintegrasi diawali dengan disusunnya Rencana Stratejik yang beroreantasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan, Pengukuran Kinerja Pelaporan serta evaluasi kinerja.

Dari siklus AKIP tersebut dapat dilihat bahwa penyusunan rencana kinerja juga merupakan fase awal dalam sistim AKIP. Untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan pemerintah daerah, maka setiap SKPD juga menyusun rencana stratejik. Rencana stratejik yang disusun oleh satuan kerja harus mempedomani rencana stratejik pemerintah daerah yang pada dasarnya merupakan suatu keselarasan rencana stratejik dalam lingkungan pemerintah daerah itu sendiri.

Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistim pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan igelimit, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efesien serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Setiap unit pemerintah yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar termasuk Kecamatan Lima Kaum harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggarannya Good Governance tersebut dengan mengembangkan dan menerapkan suatu Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencakup sikus yang tidak terputus dan terintegrasi yang diawali dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) atau Rencana Kinerja (RENJA) untuk setiap tahun. Tahap-tahapan berikutnya mencakup pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerja, pelaporan capaian kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) sebelumnya disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penyusunan Rencana Strategis akan menetukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan Pemerintah Kecamatan Lima Kaum diuraikan pada tabel Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	Meningkatnya Pemahaman dan	1.	Jumlah/Persentase Masjid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan Keagamaan	100 %, 42
	Pengamalan Ajaran Agama	2.	Jumlah/Persentase Wirid/ pengajian Yasinan, BKMT, Pondok Al-Qur'an, FASI, Remaja Masjid dan pembinaan keagamaan lainnya 1 X sebulan	100 %
		3.	Jumlah/Persentase Cabang Lomba MTQ Tk. Kabupaten yang diikuti	-
2	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai- nilai Adat dan Budaya	1.	Jumlah/Persentase Cabang Lomba yang diikuti Kecamatan dalam Festival Seni dan Budaya	80 %, 8 cabang
3	Berkurangnya Kenakalan Remaja	1.	Jumlah/Persentase Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5 Nagari 24 kali
	dan Perbuatan Maksiat	2.	Jumlah/Persentase Pembinaan Keamanan yang dilakukan di Masyarakat	48 kali 5 Nagari
		3.	Jumlah/Persentase Sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	100 %, 17 Sklh
4	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	1.	Jumlah/Persentase Kelompok Pemuda Yang dibina	100 %, 5 Nagari/ 5klp
5	Meningkatnya Kesadaran	1.	Jumlah/Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum	100 %, 5 Nagari

	Masyarakat Terhadap Norma- norma dan Peraturan Perundang- undangan	2.	Jumlah/Persentase Kelompok Organisasi yang Masyarakat yang dibina	100 %, 20 klp. 5 Ngr
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1.	Persentase masyarakat yang telah merekam Data E-KTP	100 %
	Publik	2.	Jumlah/Persentase Nagari yang melaksanakan	100 %,
			bulan bhakti goro,DAUN,DAKN dan Bulan Bakti Goro	5 Nagari
		3.	Jumlah/Persentase Musrenbang Desa/Nagari	100 %,
			yang dilaksanakan	5 Nagari
		4.	Jumlah/Persentase Buku Kecamatan Dalam	100 %,
			Angka	1 buah
		5.	Jumlah/Persentase Dokumen Keuangan (LAKIP,	100 %,
			RENJA, RENSTRA,RKA/DPA,)	5 Dok.
		6.	Jumlah/Persentase pendistribusian Raskin	100 %,
				5 Ngr
				12 bln
		7.	Jumlah/Persentase PNS yang mengikuti	100 %,
			Pendidikan	10 org

Tabel 4: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017

F. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2018

Penetapan Kinerja (TAPKIN) merupakan komitmen seluruh unsur pemerintah dalam mencapai kinerja dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi pemerintah daerah dan merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sesuai dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dengan Penetapan kinerja ini secara bersama-sama baik pihak pemberi amanat dan pihak yang menerima amanat dapat memiliki dasar yang sama didalam melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja penerima amanat pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Objektivitas penilaian atas pencapaian kinerja Kecamatan Lima Kaum dapat dipertahankan oleh semua pihak terkait sehingga tujuan perbaikan kinerja secara berkesinambungan dapat dicapai secara optimal

Sasaran stratejik indikator kinerja dan jumlah anggaran untuk mencapai target yang ditetapkan diuraikan dalam Tabel Perjanjianan Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Meningkat nya pemahaman dan pengamalan ajaran Agama	1. Jumlah Masjid / Mushalla yg duikunjungi dalam rangka pembinaan Keagamaan	45 100 %	Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan Beragama	88.243.500
		2.Jumlah Cbg. Lomba MTQ. Tk. Kecamatan yg dilak sanakan 3.Jumlah Pengunjung	10 Cbg		
		Masjid setiap hari 4.Jumlah Klp. Yasinan, BKMT, TPA / TPSA. Yang dikunhjungi	2600 org		
		, ,	5 klp / nagari		
2.	Meningkat nya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah cabang lomba yang diikuti dalam kegiatan pentas seni dan budaya	10 cbg 100%	Pengelolaan keragaman budaya/fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	16.428.700
3.	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan	5 Ngr 24 kali	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal/ Monitoring evaluasi dan pelaporan	-
		Jumlah pembinaan keamanan lingkungan yg dilakukan	5 Ngr 48 kali	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan/Pengendalian Keamanan Lingkungan	14.000.000
4.	Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	5 Klp 5 Ngr	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan/ Pembinaan Organisasi Kepemudaan	91.594.000
				Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga/Penyelenggaraan kompetisi olah raga	22.090.000
5.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan	1. Jumlah Nagari binaan sadar hukum	5 Ngr	Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah/Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	10.970.000
				Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari/ Evaluasi rancangan	14.620.000

		Jumlah kelompok/organis masyarakat yang	20 klp asi 5 Ngr	peraturan desa/nagari ttg APB desa/nagari Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Pem berdayaan Lembaga dan	39.131.100
6.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1. Persentase masyarakat yang telah merekam e- KTP	100%	Organisasi Masyarakat Perdesaan Penataan Administrasi Kependudukan/Pengembang an Data Base Kependudukan	3.300.000
		Jumlah Nagari yan melaksanakan bul bhakti goro, DAUN DAKN dan lomba Nagari	an 100 %	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa/Nagari	8.880.000
		3. Jumlah /Persentas Nagari yang melaksana kan Musrenbang Naga	100 %	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Nagari	12.500.000
			5Ngr 100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Monitoring evaluasi dan pelaporan	2.500.000
		4. Jml. buku Kecamatan dalam angka	1 buku 100 %		3.000.000
		5. Jumlah Dokumen Lakip, Renja Renst RKA,DPA dan DPP,		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.600.000
		6. Jumlah pendistribi sian Raskin	u 5 Ngr 12 bulan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Monito ring, evaluasi dan Pelaporan	10.346.000
		7. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan	10 Org 100 %	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.346.000

Tabel 5 : Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 bagi Kantor Camat Lima Kaum merupakan LKjIP yang keduabelas kali disusun, oleh sebab itu dalam penyusunannya masih ditemui berbagai hambatanhambatan utama yang ditemui dalam pengumpulan data. Akibat dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat terlihat kinerjanya, baik kinerja output maupun outcome serta beberapa kegiatan yang belum dapat dimasukan dalam penyusunan LKjIP ini, namun demikian beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diidentifikasi kinerjanya, sehingga secara umum tidak adanya informasi kinerja pada beberapa kegiatan dan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan perbandingan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance result) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance Cap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada Pihak-pihak external tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (outcome) pada sasaran digunakan

pengukuran melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria pengukuran sebagai berikut :

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
Diatas 100	Sangat memuaskan
85-100	Sangat Baik
70-85	Baik
55-70	Sedang
0-55	Kurang Baik

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2017 KANTOR CAMAT LIMA KAUM

Penetapan tujuan strategik berdasarkan visi, misi kebijakan dan strategi pembangunan sasaran-sasaran strategis Kecamatan Lima Kaum yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang ditetapkan

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah indikator keberhasilan sasaran terlaksananya pelayanan Prima disemua bidang berikut target dan capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capai an
1.	Meningkatkan nilai- nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Jumlah/persentase mesjid/musholla yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan	45 bh	100%
			Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam acara MTQ TK. Kabupaten	10 cbg	100%
2.		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah/persentase cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festifal seni dan budaya	10 cbg	20%
3.	Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman ditengah masyarakat	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Jumlah sekolahSLTP dan SLTA yang dibina	17 Sklh	100%

4.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina/karang taruna yang dibina	8 Klp	100%
5.		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Nagari binaan sadar hokum	5 Nagari	100%
6.		Meningkatnya kualitas pelayanan public	Jumlah /persentase pengembangan data base kependudukan	450	71,3%

Sasaran 1: Meningkatnya Ajaran dan Pengamalan Agama

No.		Tal	hun 2016		Tal	nun 2017		Т	ahun 2018	8	Target Tahun	
	Indikator Kinerja	Target	Realis asi	%	Target	Realis asi	%	Target	Realis asi	%	2021 (Akhir Renstra)	
1.	2. Persentase/Jumlah Mesjid/mushallah yang dikunjungi dalam rangka pembinaan.	40 bh	42 bh	105	42 bh	42 bh	100	45 bh	46bh	102	-	
	3. Persentase/jumlah cabang lomba MTQ TK. Kabupaten yang diikuti .	12 Cbg	12 cbg	100	-	-	-	10 cbg	10 cbg	100		

Tabel 6 : Analisis Capaian Kinerja - Sasaran (1)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan pembinaan keagamaan dilakukan pada kunjungan ke Masjid/Mushalla, tidak hanya pada Safri Ramadhan saja, tapi dapat dilakukan pada kunjungan khatam Al gur'an, pada acara BKMT, Yasinan, pondok Al Qur'an, Didikan Subuh dan kegiatan keagaman lainnya, seperti pada acara Festival Anak Shaleh (FASI), ceramah Agama yang mengundang kehadiran dari Pemerintahan Kecamatan, sehingga target pembinaan dapat mencapai 100 %, dengan demikian secara berangsur-angsur pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat meningkat ditengah masyarakat, terutama para generasi muda dan pelajar.

Masjid/Mushalla yang dikunjungi pada tahun 2018 adalah :

NO	MASJID/MUSHALLA	ACARA	KETERANGAN
	YANG DKUNJUNGI		
1	Masjid shufia	BKMT. Kecamatan	Nagari Cubadak
2	Mesjid Munawarah	BKMT. Kecamatan	Nagari Labuh
3	Masjid Nurul Huda	BKMT. Kabupaten	Jr. Silabuak ,Nagari Parambahan
4	Mesjid Huriyah	BKMT. Kecamatan	Malana Ponco
5	Mesjid Mustaqim	BKMT. Kecamatan	Kubu Rajo
6	Surau Rayo	BKMT. Kecamatan	Piliang
7	Mushallah Babl Khairat	Khatam Al-Qur'an	Piliang
8	Mushallah Darul Ihsan	BKMT. Kecamatan	Labuh
9	Surau Wakaf	Khatam Al-Qur'an	Balai Lbh Ateh
10	Surau Hidayatul Qur'an	BKMT. Kecamatan	Labuah
11	Mesjid Nurul Huda	BKMT. Kecamatan	Jr. Silabuak, Nag. Parambahan

12Surau UmumBKMT. KecamatanJr. Balai13Mushallah Nurul HidayahBKMT. Kecamatan Nag. Limo14Mushalla Nurul IkhlasBKMT. KecamatanBukit Go	Batu
Hidayah Nag. Limo	
	Rajo,
14 Mushalla Nurul Ikhlas BKMT. Kecamatan Bukit Go	Kaum
	mbak
15 Mushallah Istiqomah BKMT. Kecamatan Kampung	g Baru
16 Mushallah Nurul BKMT. Kecamatan Jr. Kb. Raj	
Ikhlas Limo Ka	
17 Mushallah Batu BKMT. Kecamatan Balai Lbh . Panjang	Bawah
18 Mushallah PSTWK BKMT. Kecamatan Panti Ju	mpo
19 Mushallah Jirek BKMT. Kecamatan Malana F	Ponco
20 Mushallah Nurul BKMT. Kecamatan Jr, Tigo Nii	_
Hikmah .Paramb	
21 Masjid Nurul Falah Khatam Al-Qur'an Balai B	atu
22 Masjid Nurul Iman BKMT . Kecamatan Simpa	_
Kiamb	
23 Surau Hidayah BKMT . Kecamatan Cubac	lak
24 Mushallah Muhajirin BKMT . Kecamatan Supanj	ang
25 Mushallah Al BKMT . Kecamatan Garuda	Mas
Muhajirin	
26 Mushalla Munawarah BKMT . Kecamatan Balai Lbh.	Bawah
27 Mushallah Hamdi BKMT . Kecamatan Kubu F	Rajo
28 Mushallah Wakaf BKMT . Kecamatan Cubac	lak
29 Surau Muhajirin TIM Ramadhan Supanj	ang
Kecamatan	
30 Surau Nurul Hidayah TIM Ramadhan Tiga Ba	atur
Kecamatan	
31 Surau Hidayatul TIM Ramadhan Mandaliko	Labuh
Qur'an Kecamatan	
32 Masjid Raya Lima TIM Ramadhan Lima Ka	aum
Kaum Kabupaten	nulmatic
33 Mesjid Alfaizin TIM Ramadhan Nagari Ba	aringin
Kabupaten	ا د ۸ ما
34 Surau Wakaf Didikan Subuh Balai Labu	in Ateh
Gabungan	
35 Mushallah Babusalam Didikan Subuh Jr. B. L. A	Ateh,

		Gabungan	Nag. Limo Kaum
36	Mushalla Nurul	Didikan Subuh	Parambahan
	Hikmah	Gabungan	
37	Surau Kariang	Maulid Nabi	Dusun Tuo
		Muhammad Saw	
38	Surau Akbar	Maulid Nabi	Labuh
		Muhammad Saw	
39	Mesjid Nurul Huda	Pembukaan MTQ	Jr. Silabuak
40	Mesjid Laskar	Pembukaan MTQ	Koto Gadih
41	Masjid Al Ikhlas	Pembukaan MTQ	Dusun Tuo
42	Mesjid Baitul Makmur	Pembukaan MTQ	Supanjang
43	Mesjid Raya Lima Kaum	Lomba sholat Jenazah	Lima Kaum
44	Mesjid Darul Salam	Lomba Cerdas cermat	Bukit Gombak
45	Mesjid Nurul Iman	Lomba Cerdas cermat	Simpang Kiambang
46	Mesjid Al Ikhlas	BKMT Kabupaten	Dusun Tuo

Dari tabel diatas dapat lihat prestasi yang diperoleh dengan keikut sertaan Kecamatan Lima Kaum pada MTQ TK Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Lintau Buo pada Tahun 2018 dapat kita simpulkan bahwan meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama sudah sangat baik, namun tidak menutup kemungkinan akan menuraun jika tidak diwaspadai setiap saat.

Sasaran 2: Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya

		Та	hun 201	.6	Та	hun 201	.7	Та	hun 201	18	Target Tahun	%
N O	Indikator Kinerja	Target	Reali sasi	%	Target	Reali sasi	%	Target	Reali sasi	%	2021 (Akhir Renstra)	
1.	Persentase/Jumlah Cabang Lomba yang diikuti Kecamatan dalam Festival Seni dan Budaya	5 cbg	4 cbg	80	8 cbg	0	0	10	2	20	10 cbg -	
	a-rata capaian un2018											

Tabel 7 : Analisis Capaian Kinerja - Sasaran (2)

Dalam Festival Seni dan Budaya Kecamatan Lima Kaum pada tahun 2018 pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak mengadakan lomba pada kegiatan festival budaya daerah sehingga tidak ada satupun cabang lomba yang diikuti oleh Kecamatan Lima Kaum dari target cabang lomba yang telah direncanakan. Hal ini bukan dkarenakan Kecamatan Lima Kaum tidak siap mengikuti cabang lomba, tetapi cabang lomba tidak dilaksanakan oleh Kabupaten Tanah Datar mengingat minimnya Anggaran yang tersedia.

Disini dapat kita lihat bahwa peningkatan pemahaman nilai-nilai adat dan budaya ditengah masyarakat sehingga kesenian tradisional yang sesuai adat dan budaya dapat berkembang namun masih perlu pembinaan untuk dapat memasyarakatkan adat dan budaya yang dikenal dengan ABS-SBK (Adat Basandi Sarak-Sarak Basandi Kitabbullah) dan sangat memerlukan dukungan dana (Anggaran) untuk pelaksanaannya.

Sasaran 3: Berkurangnya Kenakalan remaja dan perbuatan maksiat.

NO	Indikator	Та	hun 2016		Та	hun 2017		Та	hun 2018		Target	%
	Kinerja	Target	Realisa si	%	Target	Realisa si	%	Target	Realisa si	%	Tahun 2021(A khir Renstra)	
1	Jumlah Minoto- ring, evaluasi dan pelaporan	5 Ngr 24 Kali	5 Ngr 24 kali	100	5 Ngr 24 kali	5 Ngr 24 kali	100	5 Ngr 24 kali	5 Ngr 24 kali	100	5 Ngr 24 kali	100
2	Jumlah pembi- naan keamanan yang dilakukan di masyarakat	5 Ngr 48 kali	5 Ngr 48 kali	100	5 Ngr 48 kali	5 Ngr 48 kali	100	5 Ngr 48 kali	5 Ngr 48 kali	100	5 Ngr 48 kali	100
3	Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	17 Sklh	17 Sklh	100	17 Sklh	17 Sklh	100	17 Sklh	17 Sklh	100	17 Sklh	100
Rata	- rata capaian tahun	2018	ı		1	1	1	17 Sklh	17 Sklh	100	17 Sklh	100

Tabel 8 : Analisis Capaian Kinerja - Sasaran (3)

Pembinaan yang dilakukan dengan berlang kali dapat meningkatnya kesadaran para generasi muda untuk melanjutkan pendidikan sehingga bisa berperilaku baik dan juga para pemuda yang menyadari arti rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat, sehingga kenakalan remaja dan maksiat berkurang dengan sendirinya.

Namun demikian masih ada juga para generasi muda, remaja dan pelajar yang melakukan perbuatan-perbuatan salah dan maksiat, yang harus kita berikan pembinaan sehingga rasa aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat benarbenar tercipta.

Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

NO	Indikator		Та	hun 2017		Та	hun 2018		Target	%		
	Kinerja	Target	Realisa si	%	Target	Realisa si	%	Target	Realisa si	%	Tahun 2021(A khir Renstra	
1	Jumlah kelompok pemuda yang di bina	5 klp Orgs	5 klp Orgs	100	5 klp Orgs	5 klp Orgs	100	5 klp Orgs	5 klp Orgs	100	5 klp Orgs	100
	Rata-rata capaian tahun2018							5 kp Orgs	5 klp Orgs	100	5 klp Orgs	100

Tabel 9 : Analisis Capaian Kinerja - Sasaran (4)

Dari pembinaan yang dilakukan dapat dilihat hasil yang diperdapat seperti tumbunhnya berbagai organisasi pemuda di Nagari-nagari dan jorong dengan kegiatan yang positif, contoh organisasi Karang Taruna, kelompok randai dan lain –lainnya.

Sasaran 5 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang - undangan

N		Tal	hun 2016		Tal	nun 2017		Tal	nun 2018		Target Tahun	%
0.	Indikator Kinerja	Target	Realis asi	%	Target	Realis asi	%	Target	Realis asi	%	2021 (Akhir Renstra)	
1.	Jumlah Nagari Binaar Sadar Hukum	5 Ngr	5 Ngr	100	5 Ngr	5 Ngr	100	5 Ngr	5 Ngr	100	5 Ngr	
2.	Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina	5 Klp	5 Klp	100	5 klp	5 klp	100	5 Ngr	5 Ngr	100	5 Ngr	
Rat	a-Rata capaian tahun 2018											

Tabel 10 : Analisis Capaian Kinerja - Sasaran (5)

Pembinaan Nagari Sadar Hukum di lakukan untuk 5 (lima) Nagari, tetapi yang telah ditetapkan sebagai Nagari Kadarkum adalah Nagari Labuah, namun demikian harapan kedepannya kelima nagari dalam kecamatan lima kaum dapat menjadi Nagari Kadarkum.

Sasaran 6: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

			Tahun	2016		Tahun	2017		Tahun	2018	Target Tahun	%
N o.	Indikator Kinerja	Target	Realis asi	%	Target	Realis asi	%	Target	Realis asi	%	2021(A khir Renstra)	
1.	Persentase masyarakat yang telah merekam Data E-KTP	350 org	637 org	141	400 org	400 org	100	450 org	321 org	71,3		
2.	Jumlah Nagari yang melaksanakan bulan bhakti goro,DAUN,DAKN dan Bulan Bakti goro	5 Ngr	5 Ngr	100	5 Ngr	5 Ngr	100	5 Ngr	5 Ngr	100	5 Ngr	
3.	Jumlah Musrenbang Des/Nagari yang dilaksanakan	5 Ngr	5 Ngr	100	5 Ngr	5 Ngr	100	5 Ngr	5 Ngr	100	5 Ngr	
4.	Jumlah Buku Kecamatan Dalam Angka	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	
 6. 	Jumlah Dokumen Keuangan (LAKIP, RENJA, RENSTRA,RKA/DPA) Jumlah pendistribusian Raskin	5 Dok/20 Buku 12 Bulan/k ali	5 Dok/ 20 Buku 12 Bulan /kali	100	5 Dok/20 Buku 12 Bln /kali	5 Dok/ 20 Buku 12 Bulan /kali	100	5 Dok/ 20 Buku 12 Bulan/k ali	5 Dok/ 20 Buku 12 bulan /kali	100	5 Dok/ 20 Buku 12 bulan/k ali	
7.	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan	10 orang			10 orang	10 orang	100	10	10	100	10	
Rata 201	a-rata capaian tahun											

Tabel 11 : Analisis Capaian Kinerja - Sasaran (6)

Terlaksananya perekaman data e- KTP dengan baik, sehingga jumlah penduduk yang wajib KTP mempunyai data yang akurat.

Pelaksanaan pembangunan di masing-masing nagari berjalan dengan baik dan lancer juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Nagari dapat meningkatkan ekonomi keluarga miskin dan lancarnya tugas-tugas pemerintahan yang didukung dengan petunjuk- petunjuk teknis pelaksanaan tugas.

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2018 Kecamatan Lima Kaum telah menganggarkan Belanja sebesar Rp. 2.116.173.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.005.167.586 atau 94,75 % dan rincian sebagai berikut:

JENIS BELANJA	ANGGARAN 2018	REALISASI	%
Belanja Tidak Langsung	1.130.228.000,00	1.078.388.429,00	95,41
Belanja Pegawai	1.130.228.000,00	1.078.388.429,00	95,41
Belanja Langsung	985.945.500,00	926.779.157,00	89,03
Belanja Pegawai	50.325.000,00	49.745.000	99,96
Belanja Barang & Jasa	690.542.500,00	637.756.157	87,85
Belanja Modal	245.078.000,00	239.278.000	96,29
Jumlah	2.116.173.000,00	2.005.167.586,00	94,75

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Kaum ini menginformasikan program dan kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Kantor Camat Lima Kaum tahun 2018 disajikan menurut tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. Akuntabilitas Keuangan untuk masing-masing sasaran diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2018

					TARGET	•			R	EALISAS	SI			CA	PAIAN (%)		CAP.	
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	SPM NASI ONA L	КЕТ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Meningkat nya pemahanan dan pengamalan ajaran Agama	1.Presentase/ju mlah Masjid/Mushala yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan 2. Persentase/jml cabang lomba MTQ Tk. Kab. Yang diikuti	40 buah	42 Buah	45 buah 10 cbg	47 buah	50 buah	42 buah	42 buah	46 Buah 10 cbg			105	100	102				MTQ Tk. Kab 1 X 2 thn pada tahun 2018 MTQ Tk.Kab.
2	Meningka nya pemahaman dan pengamalan nlai-nilai adat dan budaya	Persentase/ jml. Cabang lomba yang diikuti dalam kegiatan pentas seni dan budaya	5 cbg	8 cbg	10 cbg	10 cbg	10 cbg	4 cbg	0	2cbg			80	-	20				Tidak adanya cabang lomba yg diselenng arakan pemda Tanah datar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Berkurang nya kenakalan remaja dan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan	24 kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 kali	24 Kali	24 Kali	-	-	100	100	100				Monev 2 kali sebln
	perbuatan maksiat	2. jumlah pembinaan keamanan yang dilakukan	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	-	-	100	100	100				2 kali sebln
4	Meningkatny a partisipasi pemuda dalam pembangu nan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	5 klp	7 klp	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	7 klp	5 klp	-	-	100	100	100				1 klp/ Nagari
5	Meningkat nya kesadaran masyrakat terhadap norma- norma dan peraturan perundang- undangan	1.Jumlah Nagari binaan sadar hukum 2. Jumlah klp / Organisasi masyarakat	5 Ngr	5 Ngr	5 Ngr	5 Ngr	5 Ngr 5 klp	5 Ngr	5 Ngr	5 Ngr	-	-	100	100	100				Nag. yg dittp kan sbg. Nag. Kdar kum hanya 1 Nag. Lbh 1 klp Nagari

		yang dibina													
	Meningkatny	1.Persentase	350	400	450		637	400	321		141,	100	71,3		
	a kualitas	masyarakat	org	org			org	org	org		56				
6	pelayanan	yang telah													
		merekam e-KTP													
		2. Jumlah Nagari		5	5		5	5	5		100	100	100		
		yang	Nag	Nag	Nag		Nag	Nag	Nag						
		melaksanakan bulan bhakti													
		goro, DAUN,													
		DAKN, dan													
		Lomba Nagari													
		3. Jumlah Nagari	5	5	5		5	5	5		100	100	100		
		yang	Nag	Nag	Nag		Nag	Nag	Nag						
		melaksanakan													
		Musrenbang													
		4. Jumlah buku	1	1	1		1	1	1		100	100	100		
		Kecamatan	buku	buku	Buku		buku	buku	Buku						
		dalam angka	_	_	_		_	_	_		100	100	100		
		5 jumlah	5 dok/	5 dok/	5 Dok/		5 dok/	5 dok/	5 Dok		100	100	100		
		dokumen Lakip, Renja, Renstra,	dok/ 20	dok/ 20	Dok/ 20		20	dok/ 20	20						
		RKA, DPA dan	bh	bh	bh		bh	bh	Bh						

DPPA	buku	buku	Buku		buku	buku							
6 Jumlah pendistribusiar raskin	12 bln/ kali	12 bln/ kali	12 Bln/ Kali		12 bln/ kali	12 bln/ kali	12 Bln/ Kali		100	100	100		
7. Jumlah PNS. Yang mengikut pendidikan		10 org	10 org		10 Org	10 Org	10 Org		100	100	100		

CAMAT LIMA KAUM

AFRIZAL, SENIP.19670330 198903 1 005

	Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Pagu Angg	aran (Rp)	Realisa	asi (Rp)	Capaian (%)		
		0 , 0	Awal RPJD (2016)	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
1.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran Agama	Pengembangan Wawasan dan Kebangsaan /Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama		52.891.000	88.243.500	45.891.450	82.593.300	86.77	93,60	
2.	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Budaya	Pengelolaan keragaman budaya/fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah		19.970.000	16.428.700	10.519.000	6.370.000	52.67	38,77	
3.	Berkurangnya Kenakan Remaja dan Perbuatan Maksiat	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan/Pengendalian Keamanan Lingkungan		9.000.000	14.000.000	8.955.000	12.432.500	99.5	88,80	
4.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembanguan	Peningkatan Peran Serta Kepamudaan/Pembinaan Organisasi Kepemudaan		49.520.000	91.594.000	47.622.000	89.897.100	96,17	98.15	
5.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Norma-norma dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan/Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah		13.500.000	10.970.000	13.468.400	10.682.100	99,77	97,38	

		2.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Pemberdayaan Lembaga Organisasi	60.710.000	39.131.100	53.047.400	38.846.500	87.38	99,27
6.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1.	Masyarakat Perdesaan Penataan Administrasi Kependudukan/Pengmban gan Data Base	5.000.000	3.300.000	4.980.000	3.300.000	99.6	100
		2.	Kependudukan Peningkatan Partisipasi	19.000.000	23.880.000	18.909.400	23.735.000	99,52	99,40
			Masyarakat Dalam				2011 001000	55,52	33,13
			Membangun Nagari						
			 Pembinaan Kelompok Masyakat Pembangunan Desa 	6.000.000	8.880.000	5.977.400	8.830.000	99,62	99,44
			- Pelaksanaan Musyawarah	10.000.000	12.500.000	9.934.200	12.415.000	99,34	99,32
			Pembangunan Desa - Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.000.000	2.500.000	2.950.000	2.490.000	98.33	99,60
		3.	Peningkatan	4.000.000	5.750.000	3.980.000	5.750.000	99,5	100
			Pengembangan Sistem						
			Pelaporan Capaian Kinerja						
			& Keuangan/Penyusunan						
			Laporan Capaian Kinerja						
			dan Ikhtisar Realisasi						

	Kinerja SKPD						
	4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Raskin)	15.458.000	10.346.000	13.342.000	5.432.000	86.31	52.50
	5 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/pendidikan dan pelatihan formal	12.500.000	13.000.000	4.917.000	12.483.000	39.34	96,02



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan Laporan Pertanggung jawaban serta evaluasi Kinerja setiap tahun yang harus di susun secara terpola sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja ini mudah-mudahan langkah ke depan terarah dan terpola, sehingga setiap kegiatan dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara Akuntabilitas.

Kesinambungan pembangunan khususnya di Bidang Pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini. Kecamatan Lima Kaum juga melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat, agar setiap kegiatan punya sosial kontrol.

Kecamatan Lima Kaum sebagai salah satu Kecamatan yang melakukan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.

B. SARAN

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Lima Kaum ini, kami masih merasa terdapat banyaknya kekurangan dan kekilafan serta kesalahan yang seyokyanya kami sendiri tidak menyadari bahkan tidak mengetahui sama sekali , untuk itu kami merasa perlu adanya bimbingan, masukan dan saran dari pihak manapun terutama Koordinator Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Datar.

Adapun saran dan masukan itu sangat berguna bagi kami untuk pedoman Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Cama Lima Kaum yang lebih baik dan sempurna dimasa yang akan datang.

Perlu juga kami sampaikan disini, bahwa untuk lebih sempurnanya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dapat mengadakan Study Banding ke Daerah yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah tersebut sudah baik dan dapat kita jadikan contoh dalam memberikan perubahan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Kabupaten Tanah Datar dimasa yang akan datang.

Lima Kaum, Januari 2019 CAMAT LIMA KAUM

AFRIZAL, SE NIP. 19670330 198903 1 005